



RISALAH RESMI

- Tahun : 2018
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / Tanggal : Selasa 06 September 2018
- Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
- Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
- Pimpinan Rapat : Ria Mayang Sari, S.H M. H/Ketua DPRD
- Didampingi:
1. Syarkoni Syam/ Wakil Ketua DPRD
 2. H. Kamal, HG
- Acara : Penyampaian Kata Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
- Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
- Hadir : A. 34 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:
1. **Fraksi Demokrat**
5 dari 6 orang Anggota
 2. **Fraksi Golkar**
5 dari 5 orang Anggota
 3. **Fraksi Hati Nurani**
4 dari 4 orang Anggota
 4. **Fraksi PDI-Perjuangan**
4 dari 4 orang Anggota
 5. **Fraksi PAN**
3 dari 3 orang Anggota
 6. **Fraksi Gerinda**
3 dari 3 orang Anggota
 7. **Fraksi PKS**
3 dari 3 orang Anggota
 8. **Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa**
4 dari 4 orang Anggota
 9. **Fraksi Bintang Pembangunan**
3 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

Turut Hadir : 1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bungo
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang terhormat;
3. Saudara Unsur Forkopimda Kabupaten Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Badan dan Pimpinan BUMD / BUMN dalam Kabupaten Bungo.
6. Saudara Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo.
7. Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo.
Kepada Bapak Syarkoni Syam disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : Ria Mayang Sari, S.H. M.H / Ketua DPRD Kab. Bungo
(Rapat di buka pukul 11.00 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD

Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangi daftar hadir sebanyak 27 orang dan tidak hadir sebanyak 08 orang.

Keterangan :

IZIN 01 Orang :

1. Syaiful Acik Bilal, S.pd.I (Fraksi Demokrat)

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 34 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang Rancangan Perda, berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, SKOR Saya cabut.

————Ketukan Palu 1x————

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo atau yang mewakili;
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk hadir bersama di ruangan ini, dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018.

Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafa'at Beliau di yaumul mahsyar.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Rapat paripurna pada hari ini merupakan bentuk perwujudan pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD yang diajukan oleh Bupati. Mengingat Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dalam pembahasannya berlaku pula mekanisme pembahasan Perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang salah satu pokok pengaturannya mengamanatkan bahwa salah satu rangkaian dari pembahasan Ranperda adalah Penyampaian Kata Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perda.

Pada kesempatan ini, perlu pula kami sampaikan bahwa Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan Bupati beberapa hari yang lalu telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD secara konsisten mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Selain itu, Badan Anggaran dan TAPD berupaya agar program dan kegiatan yang dimuat dalam Perubahan APBD berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk memajukan bumi langkah serentak limbai seayun.

Pada rapat paripurna kali ini, sebagaimana Nota Pengantar Bupati tanggal 04 September 2018 yang menyampaikan Ranperda tentang kerja sama Daerah, maka terhadap Ranperda Kerjasama Daerah dapat kami sampaikan bahwa sudah dilakukan pengkajian dan Pembahasan oleh Bapemperda dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, Kementerian dan Pemerintah Daerah yang berhasil mengembangkan kerja sama daerah dengan baik. Pada akhirnya, Bapemperda dan Pemerintah Daerah telah berhasil memfinalisasi Ranperda dimaksud sebagaimana Nota Dinas Bapemperda tanggal 31 Agustus 2018 dan hasil rapat kerja terakhir tanggal 05 September 2018.

Bapak/Ibu, Hadirin yang terhormat....

Hari ini sekiranya dapat disepakati oleh kita semua merupakan rapat terakhir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018, maka marilah bersama-sama kita dengar Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bungo, yang akan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi-fraksi dalam hal ini dibacakan juru bicara Fraksi Hati Nurani Rakyat kepada sdr. Ismail.HB dipersilahkan dengan hormat.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmannirrohim” Rapat

Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.

Yth. Saudara Unsur Forkopimda Kabupaten Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Badan dan Pimpinan BUMD / BUMN dalam Kabupaten Bungo.

Yth. Saudara Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo.

Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, untuk hadir Bersama diruangan ini, melaksanakan Rapat Paripurna DPRD. Semoga yang kita laksanakan hari ini membawa berkah bagi kita dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya. Amin yarobbal Alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W, semoga kita mendapatkan safa'atnya di Yaumilma'akhir.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Memasuki materi Rapat Paripurna hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Perubahan APBD dapat dilaksanakan apabila terjadi :

- a. Pembangunan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Juru Bicara : Ismail. HB (Fraksi Hati Nurani Rakyat)

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yth. Pimpinan DPRD serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Yth. Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Beserta jajaran eksekutif Kabupaten Bungo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bungo

Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, dan para Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo

Yth. Sdr. Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Bungo

Yth. Sdr. Camat, Lurah dan hadirin sekalian

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demi untuk menghasilkan sebuah Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Bungo dan Pemerintah Daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018. Yang mana keseluruhan rangkaian rapat yang diselenggarakan dan dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan kesungguhan DPRD dan Pemerintah Daerah bersama seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat yang ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan cukup melelahkan, terkadang melahirkan perdebatan-perdebatan yang serius dengan mengungkapkan gagasan yang kritis, konstruktif dalam Rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada pihak yang terlibat yang telah menunjukkan komitmen kemitraannya selama masa rapat pembahasan.

FRAKSI DEMOKRAT

Sebagai instrumen strategis, yang sejatinya APBD memberikan gambaran yang terang mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah, maka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu saja membuka ruang bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan berbagai kegiatan yang sekiranya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Namun demikian kita semua menyadari bahwa Anggaran yang telah disepakati setiap akhir tahun atau selambat-lambatnya awal tahun anggaran merupakan sebuah estimasi dan prakiraan, khususnya mengenai jumlah alokasi anggaran dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga Undang-Undang memberikan ruang akan adanya suatu perubahan dalam APBD sepanjang diperlukan. Dengan adanya Perubahan dalam APBD tersebut, maka kita berkesempatan untuk menyesuaikan berbagai Asumsi Kebijakan Umum APBD, bahwa total Belanja Daerah yang digunakan untuk aktivitas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada perubahan tahun anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp.103,32 milyar lebih atau 7,85% dari anggaran semula Rp.1,31 triliun lebih, sehingga menjadi Rp.1,42 triliun lebih. Total belanja Daerah tersebut dalam rancangan perubahan ini adalah untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.743,53 milyar lebih atau 52,31% sedangkan untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp.667,86 milyar lebih atau sebesar 47,69% pada rancangan perubahan APBD tahun Anggaran 2018 ini, Belanja Tidak Langsung masih mendapat porsi lebih besar dibanding dengan Belanja Langsung.

Mengingat waktu pembahasan APBD Perubahan saat ini sangat singkat, Fraksi Partai Demokrat tetap berkeyakinan bahwa perencanaan pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun 2018 telah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Saudara Pimpinan Sidang, serta hadirin sekalian yang berbahagia...

Berikut tentang Ranperda tentang kerja sama daerah ranperda ini merupakan salah satu amanat dari undang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yakni pasal 363 ayat(1) yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama Daerah juga bertujuan untuk mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar APBD guna percepatan pencapaian visi Bungo Maju dan Sejahtera dengan adanya perda ini diharapkan semua bentuk kerja sama daerah baik daerah lain, pihak ketiga mau pun lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dapat dilaksanakan secara tertib administrasi dan memperoleh hasil yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bungo.

FRAKSI GOLKAR

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempelajari Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan pada Paripurna yang lalu, maka pada kesempatan ini Fraksi Golkar menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD-P dan Penyusunan Anggaran bukan hanya sekedar menaikkan anggaran dari sebelumnya, akan tetapi yang lebih penting adalah pencapaian target dan indikator yang telah dilakukan dan ini sebenarnya menjadi tolak ukur dalam pencapaian Pembangunan Kabupaten Bungo. Penyusunan Anggaran hendaklah berdasarkan prinsip efisien serta efektifitas dalam penggunaan Anggaran tersebut.
2. Menurut hemat Fraksi Golkar bahwa perlu adanya upaya kreatif dalam menggali potensi Daerah hingga bisa menambah sumber Pendapatan Daerah.
3. Menurut pantauan Fraksi Golkar, keadaan didalam lingkungan Bandara Muara Bungo khususnya areal parkir tidak terpelihara dengan baik. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar Bandara Muara Bungo kembali terlihat rapi dan terpelihara.
4. Didalam Perubahan APBD Tahun 2018 ini, Fraksi Golkar melihat masih tingginya Belanja Tidak Langsung (52,35 %), untuk itu Fraksi kami berhadap kepada Pemerintah Daerah agar lebih bisa menekan tingginya angka Belanja tidak langsung pada APBD mendatang.
5. Pada Keempatan ini kembali Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk segera merealisasikan pengaspalan Jalan Lingkungan di Jalan Pelepat dan Jalan Musi Dusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir, Karena Jalan tersebut digunakan masyarakat menuju ke Sekolah Dasar dan Mesjid.

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Berikut tentang Ranperda Kerjasama Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, guna mempercepat pencapaian Visi Bungo Maju dan sejahtera demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo, Fraksi kami menyetujui Ranperda di Sahkan menjadi PERDA.

Demikian Penyampaian Kata akhir Fraksi Golkar, kami berharap beberapa catatan yang merupakan masukan dari kami yang bersifat konstruktif ini dapat menjadi perhatian, sehingga kedepannya lebih baik.

FRAKSI HANURA

Setelah dilakukannya berbagai rangkaian pembahasan tentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami dari Fraksi Hati Nurani merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan beserta saran, hal ini kami lakukan sebagai wujud rasa cinta kami terhadap Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun :

1. Fraksi Hati Nurani berharap kepada Pemerintah agar kiranya prioritas pembangunan yang berpengaruh secara langsung pada ekonomi kesejahteraan masyarakat yang sangat perlu dan mendesak, harus menjadi prioritas utama dan serius guna terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.
2. Fraksi Hati Nurani meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam mengoptimalkan segala potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dikelola secara baik. Pengelolaan PAD secara optimal dapat mengurangi ketergantungan kita pada dana Transfer dari pusat.
3. Fraksi Hati Nurani menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam Anggaran perubahan APBD tahun 2018 ini, mendorong sektor pertanian secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan, disamping dapat menggerakkan ekonomi lokal juga bisa mengurangi angka kemiskinan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Ranperda tentang kerjasama Daerah dianggap penting, mengingat adanya kerjasama yang saling menguntungkan bagi daerah yang terlibat, serta dapat mempercepat tercapainya visi misi Bungo Maju dan Sejahtera. Semoga dengan di sahkannya perda ini dapat memberikan hasil yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia

Setelah membaca Nota Pengantar yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati pada Paripurna Tanggal 4 September 2018 yang lalu dan mencermati hasil pembahasan dan Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018, maka Fraksi PDI Perjuangan perlu memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa pergeseran,

Total belanja daerah yang dari anggaran semula sebesar **Rp. 1,31 triliun** naik menjadi **Rp. 1,42 triliun lebih** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp. 103,32 milyar**.

Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 743,53 milyar lebih** atau sebesar **52,31 %**, sedangkan Belanja Langsung sebesar **Rp. 677,86 milyar lebih** atau sebesar **47,69 %**

Fraksi PDI perjuangan sungguh mengharapkan agar setiap OPD pengelola Anggaran hendaknya mengacu kepada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disepakati.

2. Variable penting lainnya yang perlu dievaluasi adalah kerja dan kinerja aparatur pemerintahan dalam mengimplementasi Perubahan ini, karena manusia merupakan variable penting dalam kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Bungo yang kita cintai ini. Sebaik apapun program yang telah disusun dan sebanyak apapun anggaran yang tersedia, namun jika tidak didukung oleh integritas dan komitmen yang baik dari para pelaksana program, maka kualitas dari program tersebut tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten Bungo.

Dan semua yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan semoga saran, usul serta pendapat Fraksi kami ini menjadi bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan serta terakomodirnya semua kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia

Terkait tentang Ranperda Kerja sama Daerah, yang mana Ranperda ini merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, yakni pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan “ pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung Ranperda ini dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan.

FRAKSI PAN

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang terhormat
Saudara Bupati dan Hadirin yang berbahagia***

Sehubungan dengan kebijakan umum rancangan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2018 tergambar Rencana target sebagai berikut :
Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 1.31 Trilyun lebih, naik sebesar 71.02 Milyar lebih (atau 5.70%) dari Pendapatan APBD tahun 2018.
Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebesar 1.42 Trilyun lebih dengan rincian, Belanja Tak Langsung Rp. 743,53 Milyar Lebih atau sebesar 52,31 % dan Belanja Langsung Rp. 677,86 Milyar lebih atau sebesar 47.69 %.
Pada Belanja Daerah tahun APBD Perubahan 2018 sebesar 1.42 Trilyun lebih pada APBD 2018 mengalami penambahan sebesar 103.32 Milyar lebih atau 7.85 % dari Belanja Daerah APBD 2018.

Jika dibandingkan antara jumlah belanja daerah dengan pendapatan terdapat selisih 104,02 Milyar Lebih. Selisih ini ditutupi dengan pembiayaan netto yang berasal dari SILPA TA 2017.

Setelah melihat dari gambaran atas KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta pembahasan di Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD Pemerintah Kabupaten Bungo, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami dan menyepakati dengan beberapa catatan :

1. Mengusulkan adanya pengembangan Struktur OPD dilingkungan SETDA Kabupaten Bungo mengingat pentingnya hal tersebut untuk menunjang terwujudnya SMART CITY di Kabupaten Bungo. OPD tersebut adalah Bagian Kominfo menjadi Dinas Kominfo, dengan menjadi Dinas maka semua kegiatan SMART CITY bisa terfokus pada Dinas ini serta Anggaran Pusat bisa mengalir dengan sendirinya. Karena sifatnya sudah tidak Koordinatif lagi, jika masih Bagian sifatnya hanya Koordinatif tidak bisa menjadi eksekutor.

2. Terkait dengan Bagian Pembangunan yang didalamnya terdapat Subag. Unit Layanan Pengadaan (ULP), kami Fraksi PAN mengusulkan untuk dijadikan Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga kegiatan ULP tidak tercampur adukan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga Sumber Daya Manusia yang bertugas di ULP semuanya independen, SDM yang ditugaskan juga tidak ter – intervensi dengan OPD – OPD asal. Ini juga sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jambi. Maka kami Fraksi PAN mengusulkan agar ULP bisa dinaikan statusnya.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Bungo melalui OPD terkait Kami minta agar di tinjau kembali tentang keberadaan loading RAM sawit di Kuamang Kuning yg semakin menjamur sehingga keberadaan KUD-KUD semakin tidak berfungsi. Permasalahan adalah mereka mengangkut TBS memakai kendaraan yang kapasitasnya lebih dari 30 ton, hal tersebut mengakibatkan rusaknya jalan karena muatan melebihi kapasitas serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Untuk itu kami mengusulkan adanya regulasi tentang RAM sawit tersebut di Kabupaten Bungo.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang terhormat
Saudara Bupati dan Hadirin yang berbahagia***

4. Permintaan kami yang sekian kalinya agar Satpol PP segera bertindak dalam menegakkan Peraturan Daerah terhadap Keberadaan kafe /warung remang di Kuamang Kuning yang hingga saat ini masih tetap beroperasi.
5. Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kami Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan Updating data PBB P2 sampai ke tingkat Kecamatan karena sampai saat ini masih ditemukan data Wajib Pajak yang tidak akurat.
6. Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah agar di APBD Tahun Anggaran 2019 menaikkan insentif Tenaga Kontrak minimal Rp. 1 Juta.
7. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo pada APBD Perubahan Tahun 2018 anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan tiap – tiap OPD dapat terealisasi, program yang belum selesai agar dapat diselesaikan dengan segera.

FRAKSI GERINDRA

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

APBD merupakan instrument teknis dari idealism pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan dan pembahasannya harus

berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomi dan tepat sasaran serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra sangat berharap pada APBD perubahan Tahun 2018 ini, anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan tiap – tiap OPD dapat terealisasi, meningkatkan kinerja masing-masing OPD untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan apa yang sudah dianggarkan agar tidak terjadi Silpa di akhir tahun.
2. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah Daerah memperhatikan bahwa dalam setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat.
3. Terkait dengan rencana Perubahan di Pendapatan Daerah yang diproyeksikan naik sebesar Rp.71,02 milyar dari anggaran sebelum berubah, maka kepada OPD Pelaksana Bidang Pendapatan agar mempunyai komitmen yang tinggi serta bertanggung jawab penuh untuk dapat merealisasikan target pendapatan tersebut.
4. Terkait dengan belanja daerah yang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan bertambah sebesar Rp.103,32 milyar, maka diingatkan dan menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Bungo dalam Belanja Daerah ini untuk segera melaksanakan kegiatan yang di rencanakan sehingga pada saat APBD berakhir, semua telah terrealisasi sesuai yang dianggarkan dan tidak terjadi Silpa yang besar.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo maka Fraksi Gerindra memandang perlu adanya kajian-kajian atau pembahasan lebih lanjut, agar dengan terbentuknya Ranperda Kerjasama Daerah hendaknya bisa menjadi dasar acuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bungo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo secara menyeluruh.

Setelah mempelajari Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan pada Paripurna yang lalu, maka pada kesempatan ini Fraksi PKS memberi beberapa masukan sebagai berikut :

1. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Langsung masih mendapatkan porsi lebih besar yakni 52,31 % dari Total Belanja Daerah atau sebesar Rp. 743,53 milyar lebih, hal ini tentunya akan menyebabkan keterbatasan

- program khususnya dalam pemerataan infrastruktur dalam rangka pemenuhan pelayanan publik;
2. Pendapatan Daerah di proyeksikan menjadi **Rp. 1,31 triliun lebih** ada kenaikan **Rp. 71,02 milyar lebih** (atau 5,70 %) dari anggaran sebelum perubahan, yaitu sebesar **Rp. 1,24 triliun lebih**. Menjadi hal yang serius untuk diperhatikan dan direalisasikan secara serius oleh pemerintah daerah untuk benar-benar mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut;
 3. DPRD merupakan mitra pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran, Fraksi PKS berharap setiap pergeseran anggaran sepengetahuan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo;
 4. Fraksi PKS meminta agar kegiatan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, segera direalisasikan serta harus ada pengawasan yang profesional dan sangsi tegas kepada kontraktor yang bermasalah;
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan Pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bungo maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bungo senantiasa memperhatikan dari segi pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama dalam hal pemerataan tenaga pendidik keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo maka Fraksi PKS mendukung penuh sepanjang kebijakan tersebut bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Bungo.

FRAKSI RKB

Setelah mencermati dan menela'ah Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018, yang diajukan oleh Saudara Bupati pada Selasa 4 September 2018 lalu, Kami Fraksi Restorasi Kebangkitan memberikan Kata Akhir sebagai berikut:

1. Secara Umum Belanja Daerah Mengalami Kenaikan Sebesar **RP 103,32 Milyar Lebih** (Atau 7,85%) Dari Anggaran Semula **Rp 1.31 Triliun lebih**, sehingga menjadi **Rp 1,42 Triliun Lebih**, Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa dapat memahami dan menyepakati dengan catatan, Pemerintah Kabupaten Bungo untuk dapat melaksanakan 5 Pilar Pembangunan yang merupakan visi dan misi Saudara Bupati Bungo dan Wakil Bupati.

Adapun 5 Pilar Pembangunan Daerah itu yaitu, **Pertama** Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, **Kedua** Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, **Ketiga** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan publik, **Keempat** Pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan serta penguatan otonomi desa, dan **Kelima** Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat.

2. Perubahan anggaran yang sebagian besar dialokasikan Kepada Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bungo belum optimal dalam melakukan efisiensi dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, kami meminta adanya Profesionalitas para OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Rakyat. Selain itu menurut hemat Kami perubahan anggaran khususnya belanja yang diajukan tetap mengutamakan aspek efisiensi. Sehingga Bungo Maju dan Sejahtera 2021 berlahan-lahan akan terwujud sesuai dengan visi misi dari Saudara Bupati.

Kata Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Kerja Sama Daerah

Terhadap Ranperda tentang Kerja Sama Daerah. Ranperda ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Pasal 363 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”. Dalam Hal ini, Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa sangat Mendukung dengan Terbitnya Perda Kerja Sama Daerah, Namun, kami menyarankan kepada Saudara Bupati untuk menanamkan prinsip berhati-hati dalam menjalin kerja sama daerah. Selama kerja sama itu menguntungkan Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa sangat mendukung demi terwujudnya Bungo Maju dan Sejahtera. Seperti contoh kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung Konsep *Smart City* yang hingga kini menurut hemat kami belum ada kelanjutannya.

Pada Prinsipnya Menurut hemat Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Demikian Kata Akhir Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa, mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan dihati, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita. Amiin.

FRAKSI BINTANG PEMBANGUNAN

Berpedoman kepada Nota Kesepakatan Pemerintah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang sudah dilaksanakan, serta Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 04 September 2018 dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati. Maka selanjutnya setelah kami mempelajari, meneliti dan mentelaah terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Disini kami masih melihat bahwa porsi Belanja Langsung belum ideal dari Belanja Tidak Langsung masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana berdasarkan nota yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati Bahwa Belanja Langsung sebesar Rp. 677,86 Milyar atau 47,69%, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 743,53 Milyar atau 52,31 %, sedangkan idealnya Belanja Langsung sebesar 70% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 30%.
Belanja Langsung dinikmati langsung masyarakat melalui program pembangunan dibidang infrastruktur, pertanian, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung maka akan diikuti oleh perubahan PDRB dan IPM.
2. Fraksi Bintang Pembangunan mengingatkan agar penggunaan anggaran dapat bekerja maksimal mengingat waktu pelaksanaan kegiatan cukup singkat. Karena itu diharapkan dalam penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan serta rampung hingga batas waktu yang ditentukan.
3. Diharapkan kepada Dinas Instansi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar pro aktif melakukan koordinasi yang berkesinambungan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Dengan memperhatikan Catatan-catatan dan Saran diatas, Berangkat dari niat yang tulus Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, **9 (Sembilan) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo Menerima dan Menyetujui:**

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2018.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Bungo menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2018.

Demikianlah Kata Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bungo, Kekurangan adalah milik manusia, dan kesempurnaan pasti hanya Milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan.

Sebelum kami tutup izinkan kami menyampaikan Pantun :

***Sudah dikirim tak ada balasan
Ternyata janji telah terlupakan
Hari ini kita ambil keputusan
Anggaran Perubahan Kita Sahkan!!!***

Nak Duo Pantun seiring

***DPRD telah member masukan
Pemda pun siap menindak lanjuti
Terima kasih banyak kami ucapkan
Semoga Pemda dan DPRD selalu bersinergi***

Nak Tigo Pantun seiring

***Terbang melayang burung cendrawasih
Hinggap tinggi ditiang bendera
Seluruh Fraksi mengucapkan terima kasih
Semoga Bungo Maju Sejahtera
Terima Kasih
Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum. WR.Wb***

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Saudara yang telah menyampaikan kata akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bungo.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Demikian Kata Akhir Faksi namun saya perlu menanyakan kembali kepada semua anggota dewan yang hadir hari ini, Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang “ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda tentang Kerja Sama Daerah dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo....?

----- Anggota Menjawab SETUJU -----

----- Ketuk Palu 1 Kali -----

Terima kasih....

Selanjutnya Acara dikembalikan kepada Pembawa Acara.

Pembawa Acara : **Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bungo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Bungo, kepada Bapak Yth Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD di mohon menuju tempat yang telah di tentukan.**
Kepada Yth Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD disilakan kembali ketempat semula.

----- Bupati Bungo Menyampaikan Sambutan -----

Bupati Bungo : **H. Mashuri, SP. ME**
Assalamualaikum Wr. Wr
Selamat Pagi dan salam sejah tera bagi kita semua,
Yth. Sdr. Pimpinan, dan Praa Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Para Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD, Para Kabag di lingkungan Pemerintah Kabupaten bungo

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, dan Para Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;

Yth. Para Camat, Lurah dan hadirin yang berbahagia

Mengawali sambutan pada hari ini, pertama tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan anugerah, rahmat dan hidayatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bungo terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018.

Sholawat triring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, serta penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Akhir kelak. Amin Ya robbal alamin.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas semua tanggapan, kritik, saran, dan pandangan yang diberikan DPRD Kabupaten Bungo, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Semua itu akan kami jadikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan guna menyusun, merumuskan, dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bungo di masa yang akan datang.

Kita semua telah berupaya keras untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD ini dengan berdasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional. Sedapat mungkin kita berusaha untuk menyelaraskan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, telah disusun dengan mempertimbangan asumsi- asumsi keuangan dan mencermati kembali progres dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang perlu ditambah atau di sempurnakan. Kita semua patut bersyukur bahwa tahapan dan rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini terjadi tidak lepas berkat dukungan dan masukan yang konstruktif dari Anggota Dewan yang terhormat.

Kami berkeyakinan bahwa semua yang disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, dilandaskan oleh niat baik, lulus, dan ikhlas, untuk turt melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk senantiasa mengemban tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia,

Mengingat keterbatasan keuangan daerah, kita akan terus berupaya untuk mengingatkan dan mengembangkan sumber pendapatan daerah kita. Selain itu, kita akan terus melakukan upaya pengelolaan APBD kita secara cermat, transparan dan akuntabel. Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin harus dilaksanakan secara cepat, efektif dan efisien. Hal ini mengingat waktu yang tersedia dalam Tahun Anggaran ini relatif pendek tinggal beberapa bulan lagi.

Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini. Selain itu telah disetujui juga Rancangan Perubahan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga semua upaya yang telah dan akan kita lakukan dalam membangun Daerah ini menjadi amal sholeh di hadapan Allah SWT, dan tentu saja di harapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

**Sekian dan Terimakasih
Billahi Taufik Walhidaya,
Wassalamulaiku, Wr. Wb.**

Pembawa Acara : Pembacaan Do,a kepada bapak Syamsuri,S.Ag, M.Pd.I

Pembacaan Do,a : Syamsuri,S.Ag, M.Pd.I

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia....

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo, Bupati dan Wakil Bupati Bungo beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dan sudah terbina selama ini, kedepan kita berharap semoga dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo ditutup secara resmi, semoga Allah SWT meridohi semua niat dan usaha baik bersama.

----- *Ketukan Palu 3x* -----

Olahraga anggar berpedang besi,
Taman Tampoenek ado berbungo,
Perubahan anggaran sudah kami setujui,
Gunakanlah untuk kemajuan Kabupaten Bungo.
Sekian dan terima kasih

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini

Terimakasih,

**Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Muara Bungo 06 September 2018
DPRD KABUPATEN BUNGO**

Ketua,



Ria Mayang Sari, S.H. M. H

BERITA ACARA
Nomor : 170/ 769 /DPRD
Nomor : 180/1628/HK

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BUNGO DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KERJA SAMA DAERAH
TAHUN 2018**

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MASHURI, SP. ME** : Bupati Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. **RIA MAYANG SARI, SH. MH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
b. **SYARKONI SYAM** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
c. **H. KAMAL, HG** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo tentang Kerja Sama Daerah.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tersebut selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada kata akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk mendapatkan pengesahan/evaluasi sebagaimana aturan dan prosedur yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bungo, 6 September 2018

**PIHAK PERTAMA
BUPATI BUNGO,**



H. MASHURI, SP. ME

**PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
KABUPATEN BUNGO**



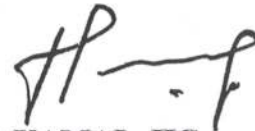
RIA MAYANG SARI, SH. MH

Wakil Ketua



SYARKONI SYAM

Wakil Ketua



H. KAMAL, HG